

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KOPERASI DAN UKM**  
**PUBLIKASI HARIAN**

**Senin, 15 September 2025**

Seusai apel kekuatan gabungan lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Kepala Dinas mengikuti rapat pimpinan rutin mingguan (Rapim) dipimpin wakil gubernur. Rapim ini fokus kepada hasil kunjungan kerja Wagub dan pimpinan OPD terkait di Jakarta di tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun poin-poin yang disampaikan pada Rapim tersebut adalah :

**Hasil pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.**

- Pemprov NTT mengajukan usulan pembangunan NTT dalam 5 tahun ke depan dengan anggaran sebesar 5,4T. Sampai semester 2 ini, sumber dana pembangunan di NTT hanya dari PAD.
- Pelabuhan di Aimere rusak berat dan perbaikan masih terkendala di biaya, karena Pemprov masih mengandalkan PAD dalam kasus ini.
- Bandara di Pulau Sabu menjadi perhatian Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, namun pada sampai saat ini operasionalisasi masih belum maksimal.
- Masih banyak daerah di NTT yang belum mendapatkan listrik dari negara. Target pada 2028 semua daerah tersebut sudah terdistribusi listrik secara keseluruhan.
- Terdapat 115 area di NTT yang belum terjangkau oleh jaringan seluler.
- Perhatian terhadap Inpres No.2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,

Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Hal ini akan selaras dengan program OVOP.

Rencana Tindak Lanjut:

- Setiap pimpinan OPD terkait harus melakukan koordinasi teknis lebih intensif dengan pemerintah pusat di dalam mengawal pembangunan di NTT, termasuk dari sisi anggaran sampai dengan eksekusi.
- Pemprov harus memastikan dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan embung, irigasi atau bendungan
- Penguatan kapasitas dan monitoring
- Mengawal pembangunan infrastruktur listrik dan jaringan, sehingga semua area di NTT tercover listrik dan jaringan secara tercukupi.
- Melaporkan seluruh hasil koordinasi kepada Gubernur atau Wakil Gubernur

**Hasil pertemuan dengan Kementerian Kehutanan.**

- Audiensi antara Pemprov NTT dan Kementerian Kehutanan berjalan lancar, dalam hal ini audiensi langsung dengan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan RI.
- Raja Juli merespon positif semua usulan dari Pemprov NTT dan mengingatkan bahwa pentingnya koordinasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Rencana Tindak Lanjut:

- Memastikan regulasi yang baik di level daerah, sesuai dengan prinsip *good government* untuk mendorong peningkatan PAD.
- Koperasi dan UKM harus didorong, terlebih selama sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat berlangsung.

## Hasil pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

- Pemprov difasilitasi untuk beraudiensi dengan *Waste Crisis Center (WCC)*, yaitu pusat layanan percepatan pengelolaan sampah nasional yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai upaya menghadapi keadaan darurat pengelolaan sampah. Dalam pertemuan ini semua pemda mendapat teguran dari WCC, karena pada TPA tidak ada proses pengolahan sampah, melainkan hanya pengumpulan sampah.
- WCC menyampaikan bahwa TPA yang dikelola oleh pihak ketiga jauh lebih baik daripada yang dikelola oleh pemda, karena TPA yang dikelola oleh pihak ketiga terdapat proses pengolahan sampah (tidak hanya pengumpulan sampah).

### Rencana Tindak Lanjut:

- Semua pemda kabupaten/kota wajib mengusulkan *grand design* Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) termasuk anggaran yang dibutuhkan.
- Pemprov harus melakukan monitoring dan evaluasi *grand design* dari masing-masing pemkab/pemkot di wilayahnya.
- Pemprov mengusulkan rapar koordinasi pada bulan Oktober dalam rangka evaluasi *grand design* tersebut beserta langkah-langkah selanjutnya.

Selain membahas hasil kunjungan kerja, Wagub juga menambahkan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh semua level pimpinan harus dibuat laporan yang memuat hasil, langkah-langkah yang akan diambil dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu, Wagub juga mengambil pelajaran dari Tour De EnTeTe di etape 1 Kota Kefamenanu, yaitu dalam hal kedisiplinan waktu. Pada etape 1 tersebut, semua siswa-siswi dari SD-SMA dikerahkan untuk menyambut para *racer* di sepanjang jalan yang mudah dijangkau, dan mayoritas siswa-siswi sangat antusias yang tercermin dalam kedisiplinan mereka dalam menepati waktu yang sudah dijadwalkan, tidak molor

sedikitpun. Begitu juga dengan para *racer* yang sangat disiplin terhadap waktu, contohnya ketika acara gala dinner yang dijadwalkan pukul 19.00, para *racer* datang tepat waktu dan langsung ambil bagian dalam makan malam tersebut, sehingga acara formal seperti sambutan dan hiburan terpaksa harus mengikuti jadwal para *racer*. Ini membuktikan bahwa pendidikan kedisiplinan waktu sangat baik, tercermin dari perilaku siswa-siswi di Kota Kefamenanu dan para *racer* Tour De EnTeTe dimana hal ini harus bisa kita contoh bersama. Selanjutnya, Wagub juga berpendapat bahwa Tour De EnTeTe ini kemungkinan akan jadi event tahunan, namun partisipan di NTT sendiri masih minim, oleh karena itu Wagub menghimbau kepada OPD terkait untuk bisa lebih mempersiapkan calon-calon *racer* yang potensi untuk mengikuti event kelas internasional tersebut, contohnya membuat event yang mirip untuk menjaring bakat-bakat yang akan mewakili NTT khususnya di Tour De EnTeTe yang akan datang.

Agenda kedua Kadis, yaitu memantau proses latihan upacara dalam rangka apel kekuatan KORPRI pada Kamis, Rabu September 2025 mendatang. Pasalnya, untuk apel kali ini berbeda dengan apel-apel sebelumnya, yaitu akan ada proses pengibaran bendera merah putih dalam apel kali ini.

